



---

## Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Publik dan Pembangunan Ekonomi Sidoarjo

**Febria Ayu Purwita**

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Nurul Lathifah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat: Kampus

Korespondensi penulis : [uinsa.ac.id](mailto:uinsa.ac.id)

**Abstrak.** *This study aims to determine how the Regional Financial Information System (SIKSDA) is used to improve local government financial management and stimulate economic growth in Sidoarjo Regency. To this end, the author used qualitative methods by conducting in-depth interviews, direct observation, and analyzing various related documents. The results indicate that SIKSDA has helped improve transparency, accountability, and efficiency in managing regional finances, thus having a positive impact on local economic development. However, several issues remain, such as a lack of human resources and adequate technological facilities, which need to be addressed for SIKSDA to function optimally. This study also provides several strategic recommendations to local governments in improving and developing SIKSDA for more effective use.*

**Keywords:** : *Financial information systems, public financial governance, economic development*

**Abstrak.** Penelitian ini ingin mengetahui cara Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) digunakan untuk meningkatkan pengelolaan uang pemerintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara mendalam, mengamati langsung, serta menganalisis berbagai dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKSDA telah membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah, sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Namun, masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya tenaga manusia dan fasilitas teknologi yang memadai, yang perlu diperbaiki agar SIKSDA dapat berjalan optimal. Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan SIKSDA agar dapat digunakan secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** *Sistem informasi keuangan, tata kelola keuangan publik, pembangunan ekonomi.*

### PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan publik yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara, khususnya di tingkat daerah, dikelola secara efisien dan efektif. Tata kelola ini mencakup proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang efektif membutuhkan tata kelola keuangan yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat, serta memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari segi transparansi, sistem digital memudahkan pencatatan transaksi yang dilakukan secara otomatis dan disimpan dalam database yang terpusat. Setiap aliran dana dapat dilacak dan dicek dengan mudah oleh lembaga pengawas maupun masyarakat. Hal ini pasti memberi dampak besar dalam memperkuat prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi menjadi salah satu tanda penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. . Pemerintahan yang efektif membutuhkan tata kelola keuangan yang dapat mendukung

perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik, serta memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. (Santoso et al., 2024).

Pengelolaan keuangan yang baik dalam tata kelola pemerintahan dapat membawa dampak positif terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Dengan adanya tata kelola yang baik, mekanisme pengawasan yang kuat, dan partisipasi masyarakat, proses perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyempurnaan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang mampu mengumpulkan dan menyimpan data keuangan, melacak transaksi, mengintegrasikan informasi dari berbagai unit dan departemen, memantau kinerja keuangan secara real time, serta mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan operasional. (Dewi & Wulandari, 2023).

Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA), menjadi sangat penting. Sistem Informasi Keuangan adalah sistem yang mengorganisasikan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data keuangan secara terintegrasi sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pengambil keputusan di pemerintahan daerah. Dengan SIKSDA, proses pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya mendukung tata kelola keuangan publik yang lebih baik.

Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan SIKSDA sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini diharapkan dapat memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas pemanfaatan SIKSDA dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Sidoarjo masih perlu dianalisis secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana SIKSDA dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan daerah di Sidoarjo dan bagaimana sistem ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SIKSDA untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang lebih maju.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi memiliki arti yang cukup luas. Menurut para ahli bidang ekonomi, secara umum pembangunan awalnya dianggap sebagai sebuah fenomena ekonomi yang diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan mengenai tujuan dan makna pembangunan semakin berkembang menjadi lebih luas lagi. Sejatinya, pembangunan harus mencerminkan perubahan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat

atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan individu serta kelompok sosial yang ada, agar bisa maju menuju kehidupan yang lebih baik secara materi dan spiritual. (Ghalidza, 2020).

Pembangunan perekonomian harus melibatkan semua pihak, terutama peran pemerintah yang harus lebih aktif karena pemerintah memiliki peraturan serta kemampuan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah dapat berkembang, sehingga tingkat pendapatan warga meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat, dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut. Secara umum, pembangunan ekonomi adalah tentang menciptakan peluang kerja bagi orang-orang yang tinggal sekarang dan berupaya mencapai kestabilan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga melibatkan pengembangan berbagai macam dasar ekonomi dan peluang kerja. (Kurniati, 2024).

Pembangunan ekonomi memiliki arti yang luas. Menurut para ahli, awalnya pembangunan dianggap sebagai fenomena ekonomi yang diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring waktu, pandangan tentang tujuan dan makna pembangunan semakin berkembang menjadi lebih luas. Sebenarnya, pembangunan seharusnya mencerminkan perubahan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan. Pembangunan juga tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar dan harapan individu serta kelompok sosial, agar masyarakat bisa berkembang menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara materi maupun spiritual. (Ambar et al., 2021).

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) adalah salah satu langkah nyata dalam mendukung teori pembangunan ekonomi. Sistem ini membantu membuat pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, akurat, dan efisien. Dengan SIKSDA, pemerintah bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah dengan lebih baik, sehingga anggaran dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bermanfaat. Dengan pengelolaan keuangan yang teratur dan terukur, kebijakan pembangunan di Sidoarjo bisa berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

### **Sistem Informasi Keuangan**

Sistem Informasi Keuangan menyimpan data keuangan secara aman dan lama dalam database komputer. Sistem ini digunakan oleh tiga pengguna dengan hak akses yang berbeda, yaitu Admin, Bendahara, dan Manajer. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola keuangan, Bendahara bisa menginput semua data keuangan, sedangkan Manajer hanya bisa melihat grafik dan mencetak laporan keuangan. Sistem informasi keuangan ini membantu meningkatkan efisiensi kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo. (Susilo et al., 2023)

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) bisa dijelaskan dari sudut pandang Good Governance, yaitu konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta keadilan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan. Prinsip Good Governance meminta setiap proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini penting karena kualitas pengelolaan keuangan langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat serta keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Penggunaan SIKSDA secara langsung membantu menerapkan prinsip Good Governance tersebut. Dengan sistem digital, pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan karena semua alokasi dan pelaksanaan belanja dicatat secara elektronik dan bisa diawasi secara langsung. Hal ini memperkuat rasa tanggung jawab pemerintah daerah karena laporan keuangan bisa dibuat lebih cepat, tepat, dan bisa dicek oleh publik atau lembaga pengawas.

Menurut penelitian Suciana dkk. (2025), penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas lewat sistem informasi terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo dapat dianggap sebagai alat penting dalam mencapai tata kelola keuangan yang baik, sekaligus mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. Menurut peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang disingkat SIKD, adalah sistem yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, serta memproses data mengenai pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya sehingga dapat disajikan kepada masyarakat serta digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 15).

Sistem Informasi Keuangan nasional dibutuhkan untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang lengkap kepada masyarakat secara luas, serta sebagai dasar bagi pejabat yang membuat kebijakan fiskal dalam mengambil keputusan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap hasil pembangunan yang ada. Sistem Informasi Keuangan juga bertugas mengelola keuangan daerah. Dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah, harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta adanya keberagaman dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah membuat stakeholder kesulitan dalam mendapatkan data konsolidasi keuangan pusat dan daerah. Secara dasar, aturan perundang-undangan yang jelas sangat penting untuk memudahkan proses integrasi tersebut. (Lazuardi et al., 2024).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) sebagai bagian dari implementasi SIKD. Aplikasi ini adalah sistem yang terintegrasi dan hanya dimiliki serta digunakan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi SIKSDA adalah sistem informasi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola kegiatan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan SKPD. Aplikasi ini bisa diakses secara online melalui alamat website <https://siksda.sidoarjokab.go.id/>.

### **Tata Kelola Keuangan Publik**

Tata kelola keuangan adalah rangkaian kegiatan dalam mengelola uang secara teratur, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan

dengan cara yang terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sektor publik, tata kelola keuangan merupakan bagian yang penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lembaga pemerintahan seperti Kantor Dukcapil, tata kelola keuangan harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik, setiap kegiatan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara tepat.

Hal ini berguna untuk mengurangi risiko penyimpangan dan meningkatkan penggunaan anggaran secara lebih efisien. Tata kelola keuangan publik mencakup seluruh aturan, proses, dan lembaga yang memastikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan penggunaan dana publik dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan dan aturan yang berlaku. Tata kelola keuangan yang baik akan memastikan kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, berdasarkan anggaran yang sudah disetujui. (Ananti et al., 2025).

Tata kelola keuangan publik adalah cara pemerintah mengurus uang negara dengan efektif, efisien, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari membuat rencana pengeluaran, mengumpulkan pendapatan, menyalurkan dana, menggunakan dana sesuai rencana, hingga melaporkan dan memeriksa penggunaan dana. Tata kelola keuangan publik yang baik memastikan uang negara digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat (Santoso et al., 2024).

Beberapa elemen utama dalam tata kelola keuangan publik meliputi:

**1. Perencanaan Anggaran:**

Proses ini menentukan kebutuhan dan prioritas pengeluaran pemerintah serta penyusunan rencana anggaran tahunan.

**2. Pengumpulan Pendapatan:**

Pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.

**3. Pelaksanaan Anggaran:**

Melaksanakan rencana anggaran dengan pengawasan ketat agar dana yang ada dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.

**4. Pelaporan Keuangan :**

Pemerintah wajib menyusun laporan keuangan yang transparansi dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

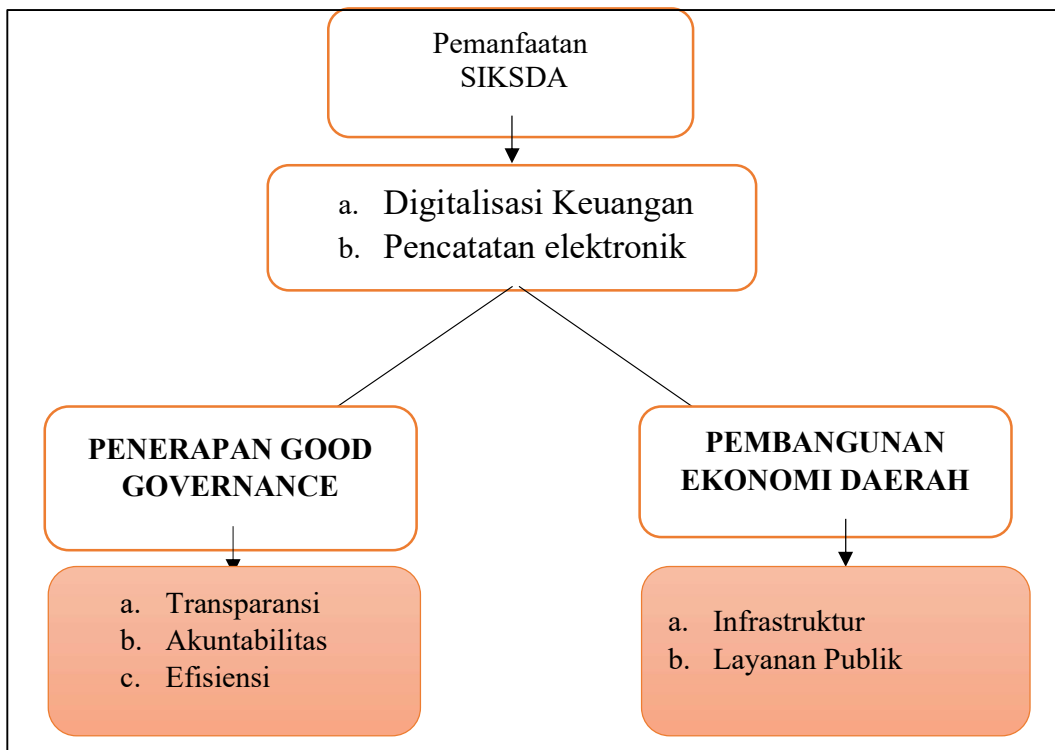
**5. Audit dan Pengawasan**

Proses audit dan pengawasan ini bertujuan untuk memeriksa efektivitas dan kegunaan dana publik serta memastikan penggunaannya sesuai aturan, sehingga bisa mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana.

Tata kelola keuangan yang baik melibatkan perencanaan anggaran yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara efisien, laporan keuangan yang jujur dan terbuka, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana negara. Prinsip dasar dalam tata kelola keuangan publik meliputi

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi memaksa pemerintah memberi informasi tentang anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan dengan jelas, tepat, dan tepat waktu kepada masyarakat. Ini penting agar penggunaan dana publik bisa dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. (Khairani et al., 2025).

Gambar 1 **Kerangka Konseptual**



Penggunaan sistem informasi keuangan sidoarjo (SIKSDA) memiliki peran penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan pembangunan ekonomi daerah. Melalui proses digitalisasi keuangan serta pencatatan secara elektronik, SIKSDA membantu menerapkan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah dengan meningkatkan infrastruktur dan layanan publik di Sidoarjo. dengan demikian, SIKSDA menjadi alat strategis untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) digunakan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan kita untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi berbagai pihak terkait dalam menerapkan dan merasakan dampak SIKSDA dalam pengelolaan keuangan daerah.

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, tempat penulis menjalani magang. Selama masa magang, penulis diberi kesempatan untuk belajar langsung penggunaan SIKSDA serta berdiskusi dengan pegawai mengenai manfaat serta tantangan saat menggunakan sistem tersebut. Dengan pengalaman tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang cukup dalam mengenai peran SIKSDA dalam mendukung pengelolaan keuangan publik serta pembangunan ekonomi di Sidoarjo.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi dan Pemanfaatan SIKSDA dalam tata kelola keuangan publik**

Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian penting untuk menciptakan pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab, dan kerjanya baik. Untuk mewujudkan pengelolaan uang yang baik, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi uang yang terhubung. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), seperti SIKSDA di Kabupaten Sidoarjo, adalah sebuah program teknologi yang mengurus dan memproses data uang daerah menjadi informasi yang tepat dan mudah dilihat. Sistem ini membantu merencanakan, melakukan, dan melaporkan uang sesuai dengan aturan akuntansi pemerintahan, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan uang daerah. Sistem informasi keuangan daerah seperti SIKSDA sangat penting untuk membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dijelaskan dalam dokumen bernama rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Dokumen ini dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah mendapatkan persetujuan dan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk menjalankan berbagai program pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2006 sebagai panduan dalam penerapannya. (Maulidi et al., 2025).

Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, proses mencatat pengeluaran dan penerimaan dana menjadi lebih otomatis dan terhubung secara langsung antar unit kerja di pemerintahan daerah. Ini membantu mengurangi kesalahan yang terjadi secara manual dan mempercepat proses pelaporan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian tentang SIKSDA menunjukkan bahwa sistem ini bekerja dengan baik jika pemerintah daerah bersikap komitmen dan seluruh instansi aktif terlibat. Sistem yang baik tidak hanya mempermudah urusan administrasi, tetapi juga menjadi alat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang bisa terus berkesinambungan. Penelitian lain di lingkungan pemerintahan daerah yang memakai aplikasi serupa menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan berbasis teknologi membantu meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam pengelolaan uang publik. Meski begitu, berhasilnya penerapan sistem ini sangat tergantung pada kemampuan SDM, dukungan dari pemimpin, serta kerja sama antar bagian. (Rahmawati et al., 2024).

Hasil penelitian tentang penerapan SIKSDA di lingkungan Sidoarjo menunjukkan bahwa kesiapan dalam digitalisasi laporan keuangan cukup baik. Namun, masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman teknis di kalangan sebagian pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan perlu diiringi dengan pembelajaran dan pelatihan yang terus-menerus. (Putra et al., 2023).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi SIKSDA  
Keberhasilan dalam menggunakan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo (SIKSDA) bergantung pada beberapa hal yang penting, yaitu:

**1.Komunikasi**

Komunikasi yang baik antara orang yang berwenang dan pegawai serta antar rekan kerja sangat penting. Jika komunikasi berjalan dengan lancar dan jelas, semua orang akan mengerti bagaimana cara menggunakan SIKSDA dengan benar. Hal ini membuat proses pengelolaan keuangan lebih mudah dan lebih tepat.

**2.Sumber Daya**

Dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, informasi yang lengkap, wewenang yang jelas, serta fasilitas yang memadai agar SIKSDA dapat digunakan secara efektif. Jika sumber daya ini dikelola dengan baik, maka pekerjaan akan lebih cepat dan hasilnya lebih baik.

**3.Sikap Pegawai**

Sikap positif dan dukungan dari pegawai sangat berpengaruh. Meskipun ada pergantian pegawai, selama mereka bersedia belajar dan mendukung penggunaan SIKSDA, sistem ini akan berjalan dengan baik. Memberikan penghargaan atau insentif juga dapat meningkatkan semangat pegawai.

**4.Struktur Organisasi**

Penempatan pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman sangat penting. Jika pegawai dipilih hanya karena hubungan pribadi atau politik, hal ini bisa menghambat proses kerja sistem. Adanya aturan kerja yang jelas dan pembagian tugas yang tepat juga membantu agar SIKSDA dapat berjalan lancar.

**Dampak Pemanfaatan SIKSDA Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah**

**1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Penggunaan SIKSDA membuat pengelolaan dana daerah lebih terbuka karena semua proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara digital. Hal ini memudahkan masyarakat dan lembaga pengawas mendapatkan informasi mengenai anggaran. Transparansi seperti ini membantu mencegah penggunaan dana yang tidak tepat dan memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola uang daerah. Pemanfaatan sistem informasi keuangan digital di Sidoarjo ini menjadi contoh yang baik dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan daerah. Selain membuat proses administrasi lebih efisien, sistem ini juga memperkuat pemerintahan yang baik sebagai dasar pembangunan ekonomi daerah yang berkesinambungan.

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo telah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masyarakat di wilayah tersebut. SIKSDA memudahkan penyajian data keuangan secara langsung dan terintegrasi, sehingga semua pihak bisa mengakses informasi tersebut. Hal ini membuat penggunaan anggaran daerah lebih mudah dilihat dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem ini juga membuat proses pelaporan dan audit keuangan lebih mudah karena data tersimpan secara rapi dan teratur. (Nurlaila,t.t)

**2. Efisiensi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran.**

Dengan sistem SIKSDA, data keuangan bisa diakses lebih cepat dan lebih akurat, sehingga perencanaan anggaran lebih tepat sasaran. Proses administrasi yang dahulu memakan waktu dan rentan kesalahan kini menjadi lebih singkat dan terhindar dari hambatan. Akibatnya,

proses pengeluaran dana hingga pengembangan program pembangunan bisa berjalan lebih efisien dan tepat waktu.

### **3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik**

Dana yang digunakan secara efisien memungkinkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya lebih cepat dilakukan. Dampak langsungnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik juga memudahkan distribusi barang dan jasa di Sidoarjo.

### **4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah**

Dengan pengelolaan dana yang lebih transparan, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih baik untuk menarik investasi. Investor lebih tertarik berinvestasi di daerah yang mengelola dana secara jujur dan akuntabel. Hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, munculnya peluang usaha baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

### **5. Kendala dalam Pengelolaan SIKSDA**

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan SIKSDA masih menghadapi beberapa masalah, seperti keterbatasan tenaga ahli dalam penggunaan sistem serta kebiasaan kerja manual yang masih kuat. Jika tidak diatasi dengan pelatihan yang baik dan perubahan budaya kerja, manfaat SIKSDA tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah.

## **Hasil Pembahasan**

Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), terutama SIKSDA, sangat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini memudahkan pencatatan keuangan secara otomatis dan menyimpan data secara ringkas, sehingga memudahkan pengawasan oleh publik dan lembaga terkait. Perubahan digital ini membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi juga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa penggunaan sistem akuntansi, penerapan transparansi, dan pengawasan keuangan berpengaruh besar terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Maria G. Yuliana dkk., 2025).

Lebih lanjut, pemanfaatan sistem informasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan transparansi keuangan dan mendorong iklim investasi yang menguntungkan. Kota atau kabupaten yang mengelola keuangannya secara jujur dan akuntabel biasanya lebih menarik investor, yang akhirnya membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja (Rahman, 2025).

Selain itu, sistem SIKSDA juga membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran lebih efisien. Akses cepat dan akurat terhadap data keuangan membuat pemerintah lebih mudah menentukan prioritas pembangunan, terutama di bidang infrastruktur dan layanan publik. Hasilnya, pembangunan lebih tepat sasaran, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penerapan sistem ini masih ada kendala seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan tenaga ahli yang memahami teknologi, dan

kurangnya infrastruktur pendukung. Hal-hal ini harus diperbaiki agar pemanfaatan sistem keuangan daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan (Sriwijayanti, 2018).

## **KESIMPULAN**

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) di Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menerapkan sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih terbuka, bertanggung jawab, dan hemat. Hal ini membuat masyarakat lebih percaya kepada pemerintah daerah, serta membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, adanya SIKSDA mendorong terciptanya birokrasi yang lebih terbuka, sehingga mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran membantu program pembangunan lebih tepat sasaran, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, SIKSDA tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang berbasis tata kelola keuangan yang baik. Namun, penelitian juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan tenaga manusia, kebiasaan kerja manual yang masih kuat, dan sarana teknologi yang belum merata. Untuk itu, keberhasilan penggunaan SIKSDA memerlukan dukungan berupa peningkatan kemampuan SDM, perbaikan sistem birokrasi, serta pengembangan sarana teknologi informasi. Jika hambatan tersebut dapat diatasi, maka SIKSDA memiliki potensi untuk menjadi contoh pengelolaan keuangan publik yang lebih modern, dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten Atau Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 1–12.
- Ananti, A., Harmain, H., & Daulay, A. N. (2025). Analisis Tata Kelola Keuangan Kantor DUKCAPIL Kota Binjai Berdasarkan Perpektif Good Governance. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 14(3), 1291–1306.
- Dewi, G. A., & Wulandari, A. A. A. I. (2023). Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 106–111. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/>
- Ghalidza, N. M. B. (2020). Konsep Blue Economy Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Binis*, 22(1), 27–31.
- Khairani, S., Yulanda, K., & Sari, E. N. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan di Sektor Publik . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 25(2), 57–66. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>
- Kurniati, E., Supriyaningsih, O., Andini, D. T., Lestari, E. D., Prameswarim Salsabila Putri, & Sarmila. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pmembangan Ekonomi Daerah. *Jiic: Jurnal Intelek Ihsan Cendikia*, 1(9), 6064–6076. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Lazuardi, A., Gunarianto, & Pawestri, H. P. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. *Jurnal Maneksi*, 13(3), 582–595.
- Lumban Gaol, L., Budi Santoso, E., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Mau, M. G. Y., Sari, A. R., & Irianto, M. F. (2025). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(4), 1–8.  
<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>
- Maulidi, M. R., Saafira, Z., Nabila, J., Mariana, & Rahmati. (2025). Digital Transformation In Local Government: Enhancing Financial Transparency Through The Regional Financial Information System (SIKD). *Jurnal HEI EMA*, 4(1).
- Nurlaila, D. D., & Hariyanto, W. (n.d.). *Implementasi Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo*.
- Pratommi, M. W., Muhsyraf, S. A., & Isnawati. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Risma*, 3(4), 99–109.
- Putra, F. P., Matahurila, G. B. R., & Hwihanus, T. R. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Berbasis Digital (Akuntasiku) Pada Laporan Keuangan UMKM Kue Bunda Ria Sidoarjo, Jawa Timur. *Musyari: Neraca Manajemen Dan Ekonomi*, 3(5).
- Rahman, F., Srihamdayani, & Hasriadi, L. M. (2025). Dampak Penggunaan Sistem Informasi Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Eksis*, 21(1), 121–134.
- Rahmawati, M. A., Krisnawati, A., Nadzah, S., Widiyanti, N. P., & Utomo, H. A.-R. (2024). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Sustainable Jurnal Akuntansi*, 4(2), 197–210.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis Pengaruh Trasparansi, Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Ekobistek*, 7(1), 88–101.
- Suciana, S., Tri Widiastuti, C., & Meiriyanti, R. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 997–1008.  
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam>
- Susilo, B., Kusuma, G. H., Hayatul Fikri, M., Saputri, R., Putri, R. A., & Rohimah, S. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Lurah Kotabaru Reteh Dengan Metode Rapid Application Development (RAD). *Jurnal Testing Dan Implementasi Sistem Informasi*, 1(1), 17–28.